



HUBUNGAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT KEMISKINAN, DAN KESENJANGAN PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012

Nely Aulia✉

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima April 2014

Disetujui Mei 2014

Dipublikasikan Juni 2014

Keywords:

Fiscal Capacity, Economic Growth, Rate of Poverty, Income Inequality

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana hubungan desentralisasi fiskal melalui DDF, elastisitas PAD, dan kapasitas fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2003-2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan jenis data yang dipergunakan adalah time series yang dikumpulkan dari berbagai macam sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. Metode analisis digunakan analisis deskriptif kualitatif dan korelasi kanonikal. Hasil penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara variabel dependen desentralisasi fiskal melalui Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), elastisitas PAD, dan kapasitas fiskal dengan variabel independen pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan secara bersama-sama. Pada variabel independen hanya variabel DDF yang mempunyai hubungan paling erat dengan variabel dependen. Sedangkan pada variabel dependen, variabel kesenjangan pendapatan memiliki hubungan paling erat dengan variabel independen.

Abstract

The purpose of the study aims to determine how the relationship of fiscal decentralization through DDF, the elasticity of revenue, and the fiscal capacity to economic growth, rate of poverty, and income inequality district / town in Central Java province in 2003-2012. The data used in this study are secondary data and the type of data used is the pooling of data collected from various sources, namely the Central Statistics Agency (BPS) Central Java Year 2012. The method of analysis used descriptive qualitative analysis and canonical correlation. The results of this study there is a significant relationship between the dependent variable fiscal decentralization through Fiscal Decentralization Degree (DDF), the elasticity of revenue, and the fiscal capacity of the independent variables of economic growth, Rate of Poverty, and income inequality simultaneously. On the independent variables only variables that have the Fiscal Decentralization Degree of the closest relationship with the dependent variable. While the dependent variable, the variable income gap is most closely connected with the independent variables.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 1 FE Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: neiwon_kawaii_lovers@yahoo.co.id

ISSN 2252-6765

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah merubah sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi melalui pelaksanaan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan beberapa kewenangan yang disertai dengan sumber daya pada pemerintah daerah sehingga daerah memiliki kewenangan dan kekuatan yang lebih besar melaksanakan kebijakan untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan di daerahnya.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2002:128). Cara mengukur tingkat kemandirian yaitu dengan membandingkan besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah.

Tabel 1. Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2003/2012 (dalam persen)

Kabupaten/Kota	Tahun									
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kab. Cilacap	9,69	10,10	11.74	8.46	8.02	8.83	10.06	11.23	10.56	10.83
Kab. Banyumas	9,42	9,77	11.28	10.51	11.11	10.28	6.99	13.61	12.13	13.34
Kab. Perbalingga	8,62	8,67	10.90	9.28	8.99	9.33	11.14	6.12	9.95	10.36
Kab. Banjarnegara	7,53	8,75	8.96	7.94	7.14	5.90	9.03	7.35	6.59	7.90
Kab. Kebumen	7,21	6,04	6.61	12.96	7.99	6.84	7.16	6.01	5.76	7.07
Kab. Purworejo	6,17	5,99	6.96	5.91	6.95	7.21	8.09	8.68	8.78	8.41
Kab. Wonosobo	6,25	7,64	7.05	6.25	6.73	7.93	6.89	7.27	6.88	7.99
Kab. Magelang	9,35	10,07	11.47	9.38	9.15	9.35	8.64	7.97	8.11	9.43
Kab. Boyolali	9,39	9,18	7.98	9.41	9.53	8.14	8.81	9.42	8.77	10.05
Kab. Klaten	4,68	5,52	5.50	4.96	5.91	5.10	4.73	5.18	5.30	5.61
Kab. Sukoharjo	5,88	6,08	7.99	8.01	6.90	6.09	6.66	8.08	9.47	13.55
Kab. Wonogiri	6,46	6,90	8.02	6.93	6.93	6.43	6.93	6.62	6.61	7.47
Kab. Karanganyar	6,90	7,00	7.52	8.41	8.87	8.36	8.69	9.09	9.97	9.50
Kab. Sragen	10,60	11,02	10.45	8.42	8.80	8.15	9.11	9.02	8.64	9.76
Kab. Grobogan	8,48	9,66	8.37	7.05	7.05	8.29	6.01	8.30	7.55	7.97
Kab. Blora	7,72	8,15	6.37	6.79	6.46	6.89	6.88	5.82	6.65	7.27
Kab. Rembang	7,25	6,89	9.30	8.23	8.28	8.90	8.83	9.64	8.46	10.10
Kab. Pati	9,78	12,59	11.64	10.81	10.05	9.10	9.73	11.23	10.94	11.08
Kab. Kudus	9,95	12,7	10.93	9.73	8.27	7.79	8.74	11.23	12.37	10.31

Kabupaten/Kota	Tahun									
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
		7								
Kab. Jepara	14,97	12,87	12.35	10.03	7.85	9.33	9.97	9.39	8.86	9.90
Kab. Demak	5,70	5,21	6.04	6.81	5.69	6.42	6.79	5.45	6.59	8.71
Kab. Semarang	11,13	11,72	13.77	11.65	10.79	11.09	11.79	11.83	11.84	12.41
Kab. Temanggung	6.38	6.38	7.69	6.84	6.67	6.55	7.59	8.17	7.69	8.12
Kab. Kendal	9.80	8.39	9.38	10.99	11.66	9.99	9.72	9.57	8.21	9.72
Kab. Batang	8.33	8.42	7.61	5.70	6.16	8.52	7.24	7.04	7.57	9.07
Kab. Pekalongan	8.21	8.20	9.31	6.48	7.60	7.45	8.68	9.01	8.89	10.30
Kab. Pemalang	6.37	6.21	8.74	10.20	8.14	8.82	9.87	7.40	6.70	7.29
Kab. Tegal	9.63	9.72	10.26	8.17	8.92	9.14	8.20	7.72	7.48	8.76
Kab. Brebes	5.53	4.95	7.11	6.29	7.81	7.78	8.49	6.44	5.95	6.50
Kota Magelang	10.69	12.48	14.91	9.47	10.99	11.23	12.50	14.82	12.57	15.70
Kota Surakarta	15.38	16.19	7.82	15.39	14.64	13.71	13.99	13.28	17.59	18.69
Kota Salatiga	12.36	13.35	14.52	11.92	11.96	11.56	13.70	12.69	12.68	11.67
Kota Semarang	22.44	22.29	24.02	21.30	22.00	20.03	19.90	20.20	25.44	30.98
Kota Pekalongan	7.92	8.76	7.89	6.40	7.77	6.60	8.17	11.49	12.42	14.85
Kota Tegal	14.32	16.61	19.47	22.02	18.15	17.99	21.37	21.98	21.41	24.07

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2003-2012 (data diolah)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa keadaan rasio kemandirian fiskal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuatif selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2012. Kota Semarang yang menjadi ibukota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 mengalami penurunan rasio kemandirian fiskal. Namun pada tahun 2011 dan 2012 Kota Semarang mampu meningkatkan rasio kemandirian fiskal mencapai 30,98 di tahun 2012. Menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2003 sampai tahun 2012 memiliki rasio kemandirian fiskal yang mengalami fluktuatif dan kurang dari atau sama dengan 30%. Hal ini menunjukkan bahwa 35 Kabupaten/Kota memiliki pola

hubungan yang rendah sekali. Artinya dalam pengelolaan keuangan daerah masih adanya peran pemerintah pusat yang sangat dominan. Sehingga keseluruhan kabupaten/kota belum dapat dikatakan mandiri dalam sektor keuangan.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Jadi, persentase pertambahan output haruslah lebih tinggi dari persentase pertumbuhan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan akan berlanjut (Tarigan, 2005). Selama tahun 2003 sampai tahun 2012, perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah cenderung berfluktuatif. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa

Tengah pada tahun 2003 sebesar 4,98% , tahun 2004 sebesar 5,13%, tahun 2005 sebesar 5,35%, tahun 2006 sebesar 5,34% , tahun 2007 sebesar 5,59%, tahun 2008 sebesar 5,61% , tahun 2009 sebesar 5,14%, tahun 2010 sebesar 5,84%, tahun 2011 sebesar 6,03%, tahun 2012 sebesar 6,34%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2003 sampai 2010 sebesar 5,53%, cukup tinggi namun apabila dibandingkan dengan provinsi lain yang berada di Pulau Jawa masih kalah bersaing dengan Provinsi Banten yang memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 7,41%. Kemudian provinsi lain yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah adalah Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,06%, Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,03%, Provinsi Bali dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,95%, dan Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,60%. Provinsi Jawa Tengah rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya unggul dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan kata lain tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi terendah keenam di Pulau Jawa.

Kebijakan desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi upaya penurunan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan kemiskinan didefinisikan sebagai penurunan kualitas berbagai aspek kehidupan, baik kebutuhan dasar, pendapatan rumah tangga maupun keamanan. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka menurunkan kemiskinan merupakan dampak kebijakan desentralisasi yang cukup penting (Risalam, 2013). perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2003-2012 secara absolut terjadi penurunan sekitar 7,16%. Jumlah penduduk miskin tahun 2012 4.863 ribu jiwa. Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2003-2012 mengalami penurunan dan hingga akhir tahun 2012 persentase kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 14,62%, kondisi kemiskinan Provinsi Jawa Tengah masih tergolong tinggi. Berdasarkan tingkat kemiskinan, beberapa

provinsi dengan tingkat kemiskinan di atas tingkat nasional (11,68) pada tahun 2012. Provinsi-provinsi tersebut adalah DIY (15,33), Jawa Timur (13,16), Jawa Tengah (14,62).

Kesenjangan pendapatan antarwilayah dapat diukur melalui Indeks Williamson. Indeks Williamson Tahun 2003-2012 di Jawa Tengah bergerak fluktuatif. Pada tahun 2003 Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Sebesar 0,64 , tahun 2004 sebesar 0,65 , tahun 2005 sebesar 0,66 , tahun 2006 sebesar 0,68 , tahun 2007 sebesar 0,64 , tahun 2008 sebesar 0,64 , tahun 2009 sebesar 0,64 , tahun 2010 sebesar 0,63 , tahun 2011 sebesar tahun 0,63 , 2012 sebesar 0,63. Indeks Williamson Jawa Tengah masih di atas angka 0,5, yang menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan di provinsi Jawa Tengah masih cukup tinggi.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang berfluktuatif setiap tahunnya setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal, namun di sisi lain terjadi ketimpangan pendapatan regional antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah serta tingkat kemiskinan yang masih tinggi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Desentralisasi atau otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi pemerintah yang menjadi bawahannya atau yang bersifat semi independen dan atau kepada sektor swasta (*World Bank*). Otonomi daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Sehingga dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat penting dalam perwujudan otonomi daerah yang baik.

Kemampuan Keuangan Daerah

Kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Dalam hal ini, faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Kemampuan keuangan daerah berdasarkan konsep Musgrave & Musgrave (1980) dalam Sumarsono (2009) dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

1. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal digunakan ukuran sebagai berikut :

$$DDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100 \%$$

$$DDF = \frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Untuk Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100 \%$$

$$DDF = \frac{\text{Sumbangan Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100 \%$$

Dimana : $TPD = PAD + BHPBP + SB$, kalau hasilnya tinggi, derajat desentralisasinya besar (mandiri).

2. Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dicari dengan menghitung indeks pelayanan public per kapita (IPP) dengan rumus :

$$IPP = \frac{\text{Pengeluaran Per Kapita untuk Jasa – Jasa Publik (PPK)}}{\text{Standar Kebutuhan Fiskal Daerah (SKFD)}} \times 100 \%$$

PPP = Jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan per kapita masing-masing daerah

$$SKF = \frac{\frac{\sum \text{Pengeluaran Daerah}}{\sum \text{Penduduk}}}{\sum \text{Kecamatan}}$$

Keterangan : Kalau hasilnya tinggi, maka kebutuhan fiskal daerah tersebut tinggi.

3. Kapasitas Fiskal

Untuk mencari Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*), dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$FC = \frac{\frac{\text{Produk Domestik Bruto (PDB)}}{\sum \text{Penduduk}}}{\text{Kapasitas Fiskal Standar (KFs)}} \times 100 \%$$

$$KFs = \frac{\frac{\sum PDB}{\sum \text{Penduduk}}}{\sum \text{Kecamatan}} \times 100 \%$$

Keterangan : Kalau hasilnya tinggi, artinya kapasitas fiskal daerah tersebut tinggi.

4. Upaya Fiskal (*Tax effect*)

Upaya fiskal (UPPAD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$UPPADj = \frac{PADj}{PADj \text{ (Selain migas)}} \times 100 \%$$

5. Tingkat PAD standar

Tingkat PAD standar (TPADs) diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$TPADs = \frac{\frac{\sum PAD}{PDB \text{ Nonmigas}}}{\sum \text{Kecamatan}} \times 100 \%$$

6. Elastisitas PAD

Elastisitas PAD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$e = \frac{\Delta PAD}{\Delta PDRB}$$

Semakin elastis PAD suatu daerah, maka struktur PAD struktur PAD di daerah akan semakin baik.

Konsep Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Hubungan Desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan desentralisasi fiskal berdampak positif meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya akan kekayaan alam daripada daerah yang bukan pusat bisnis. Otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal pada umumnya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah karena pemberian wewenang yang lebih luas

diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sehingga memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan perkapita (Waluyo, 2007:19).

Hubungan Desentralisasi Fiskal dengan Tingkat Kemiskinan

Menurut Zulyanto (2010:12) menyatakan bahwa dalam desentralisasi fiskal besarnya transfer dana di daerah dapat memiliki hubungan positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal dapat mendorong pendapatan perkapita di daerah sehingga dapat mengurangi penduduk miskin dan sebaliknya rendahnya pendapatan perkapita akan menambah jumlah penduduk miskin.

Hubungan Desentralisasi Fiskal dengan Kesenjangan Pendapatan

Penelitian Sianturi (2011), Mengenai Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara) menghasilkan kesimpulan bahwa ketimpangan wilayah, desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi dari 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara meningkat tiap tahunnya, tetapi grafik pertumbuhan ekonomi meningkat tiap tahunnya justru meningkatkan ketimpangan wilayah yang terjadi antar kabupaten/kota di propinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2003-2012. Data yang diteliti meliputi meliputi data APDB berupa realisasi total pendapatan daerah dan realisasi pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan *time series* dan *cross section*. Data time

series periode tahun 2007-2011 sedangkan data *cross section*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif statistik dan korelasi kanonikal.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2003-2012.

Variabel dalam penelitian ini antara lain : (1) Variabel terikat (*dependent variable*) yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan; (2) Variabel bebas (*independent variable*) antara lain: kemandirian fiskal suatu daerah yang dilihat dari Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), elastisitas PAD, dan kapasitas fiskal.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Spesifikasi Model Korelasi Kanonikal

$$Y_1 + Y_2 + Y_3 = X_1 + X_2 + X_3$$

$$\text{Prtm}_b_Eko + \text{Tingk_Kmisk} + \text{Ksnj_Pnd} = \text{DDF} + \text{Elast_PAD} + \text{Kpsts_Fisk}$$

Keterangan :

Variabel Dependen (Y):

Prtm_b_Eko = Pertumbuhan Ekonomi

Tingk_Kmisk = Tingkat Kemiskinan

Ksnj_Pnd = Kesenjangan Pendapatan

Variabel Independen (X):

DDF = DDF (Derajat Desentralisasi Fiskal)

Elast_PAD = Elastisitas PAD

Kpsts_Fisk = Kapasitas Fiskal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghazali (2011) dalam analisis korelasi kanonikal uji asumsi klasik yang dapat dilakukan antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji linearitas. Berdasarkan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji

linearitas model terbebas dari masalah asumsi klasik.

Korelasi Kanonikal

Uji Signifikansi

1. Pengujian Secara keseluruhan

Pengujian secara keseluruhan dilakukan untuk mengetahui apakah secara keseluruhan korelasi kanonikal signifikan. Uji keseluruhan korelasi kanonikal dengan Uji Pillais, Hotellings, Wilks dan Roy. Secara kolektif fungsi kanonikal signifikan pada taraf nyata 0,01.

Tabel 1

Uji Signifikansi Multivariate

*** Analysis of Variance -- Design
1***

EFFECT .. WITHIN CELLS Regression

Multivariate Tests of Significance (S = 3, M = 1/2, N = 13 1/2)

Test Name	Value	Approx.	F	Hypoth.
DF	Error DF	Sig. of F		
Pillais	1.04148	5.49491	9.00	93.00
	.000			
Hotellings	3.80879	11.70852	9.00	83.00
	.000			
Wilks	.16666	8.55083	9.00	70.73
	.000			
Roy	.77720			

Sumber : Hasil Olah Data SPSS oleh penulis, 2014

Tabel 1 memperlihatkan hasil uji signifikansi multivariate. Biasanya yang digunakan adalah Wilks's Lambda yang menguji signifikansi dari korelasi kanonikal pertama. Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa berdasarkan uji statistik menunjukkan semua signifikansi berada di bawah tingkat kepercayaan 5% yaitu 0,000. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan korelasi kanonikal pertama dalam penelitian ini signifikan.

2. Pengujian Secara Individual

Pegujian secara individual dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu korelasi kanonikal signifikan.

Tabel 2 Eigenvalues dan Korelasi Kanonikal

Eigenvalues dan Korelasi Kanonikal

Eigenvalues and Canonical Correlations

Root	No.	Eigenvalue	Pct.	Cum.	Pct.
Canon	Cor.	Sq.	Cor		
1		3.48841	91.58818	91.58818	
		.88159	.77720		
2		.25617	6.72584	98.31401	.45159
		.20393			
3		.06422	1.68599	100.00000	.24564
		.06034			

Dimension Reduction Analysis

Roots	Wilks L.	F	Hypoth.	DF	Error DF
Sig. of F					
1 TO 3	.16666	8.55083	9.00	70.73	
	.000				
2 TO 3	.74803	2.34327	4.00	60.00	
	.065				
3 TO 3	.93966	1.99069	1.00	31.00	
	.168				

Sumber : Hasil olah Data SPSS oleh Penulis, 2014

Di dalam persamaan (model) penelitian ini, terdapat tiga variabel dependen dan tiga variabel dependen. Jika diambil jumlah terkecil, maka akan terbentuk tiga fungsi kanonikal. Ketiga fungsi kanonikal ini terlihat pada tabel 2 (Roots) dengan angka korelasi kanonikal (canon cor) untuk fungsi I adalah 0,88159, fungsi ke II adalah 0,45159, dan fungsi ke III adalah 0,24564. Berarti korelasi pertama lebih penting dari pada korelasi kedua dan ke tiga. Begitu juga dilihat dari eigenvalue dimana fungsi I bernilai 3,48841 (di atas 0,5), fungsi 2 bernilai 0,25617 (di bawah 0,5), dan fungsi 3 bernilai 0,06422 (jauh di bawah 0,5). Untuk korelasi kanonikal pertama covariate variabel kanonikal mampu

menjelaskan 77,72% variasi dalam variabel kanonikal dependen, korelasi kanonikal kedua mampu menjelaskan variasi sebesar 20,39%, korelasi kanonikal ketiga mampu menjelaskan variasi sebesar 6,03%. Oleh karena itu, maka korelasi kanonikal yang akan dianalisis lebih lanjut hanya fungsi kanonikal yang pertama.

Jika dilihat pada kolom signifikan (sig. of f) yang menguji fungsi kanonikal terlihat untuk fungsi 1 signifikan pada 0,000, pada fungsi 2 signifikan pada 0,065, dan fungsi 3 signifikan pada 0,168. Oleh karena fungsi 1 yang memiliki signifikansi di bawah 0,5 proses selanjutnya membandingkan dengan besaran korelasi. Dengan batas 0,5 untuk kekuatan korelasi kanonikal, hanya fungsi 1 yang mempunyai korelasi kanonikal (can cor) di atas 0,5 yaitu 0,88159. Dengan demikian hanya fungsi 1 yang dapat dianalisis lebih lanjut.

Intepretasi Kanonikal *Variates*

Intepretasi kanonikal *variates* dilakukan dengan menganalisis fungsi kanonikal yang telah ditentukan dan menentukan pentingnya masing-masing variabel awal (original) di dalam hubungan kanonikal.

kanonikal *variates* adalah kumpulan dari beberapa variabel yang membentuk sebuah variat. Dalam kasus ini, terdapat tiga kanonikal *variates* yaitu dependen kanonikal *variates* yang terdiri dari tiga variabel dependen tingkat pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan serta independen kanonikal *variates* yang terdiri dari tiga variabel independen DDF, elastisitas PAD, dan kapasitas fiskal. Analisis bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam kanonikal *variate* tersebut berhubungan erat dengan dependen variat, yaitu dengan besaran korelasi masing-masing independen variabel dengan variatennya. Ada dua metode yang digunakan, yaitu :

a. *Canonical weight* (bobot kanonikal)

Variabel yang memiliki angka *weight relative* besar (di atas 0,5) dianggap memberikan kontribusi lebih pada *variate* dan sebaliknya.

Hasil output SPSS bobot kanonikal akan disajikan pada tabel 3 berikut ini

Tabel 3 Bobot kanonikal

Standardized canonical coefficients for DEPENDENT variables			
Function No.			
Variable	1	2	3
Pertmb_E	.28575	.96381	-
.07304			
Tingt_K	-.49456		.21543
-.89174			
Ksnj_Pe	.68302	-.22680	-
.74308			
Standardized canonical coefficients for COVARIATES			
CAN. VAR.			
COVARIATE	1	2	3
DDF	.71121	1.57925	.20723
Elast_PA	-.47559	-.92805	.88114
Kpst_Fis	.46733	-1.39477	-.08060

Sumber : Hasil olah Data SPSS oleh Penulis, 2014

Oleh karena yang dapat dianalisis dan diproses hanya fungsi kanonikal 1, maka yang akan diperhatikan hanya fungsi 1, fungsi 2 diabaikan. Pada tabel 3, untuk fungsi 1 pada dependen variabel, terdapat satu angka korelasi di atas 0,5 yaitu 0,68302 (Ksnj_Pe). Berarti variabel tersebut mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel independen. Variabel Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan memiliki angka korelasi dibawah 0,5 yaitu 0,28575 (Tingt_k) dan -0,49456 (Tingt_K), berarti memiliki hubungan yang lemah dengan variabel independen. Sedangkan untuk variabel independen hanya ada satu variabel dengan angka korelasi di atas 0,5 yaitu 0,71121 (DDF). Variabel Elastisitas PAD dan kapasitas fiskal menunjukkan angka korelasi di bawah 0,5 yaitu -0,47559 (Elast_PA) dan 0,46733 (Kpst_Fis) yang artinya memiliki hubungan yang lemah dengan variabel dependen.

b. *Canonical Loading* (Muatan Kanonikal)

Muatan kanonikal mengukur korelasi linier sederhana antara variabel awal dalam variabel dependen atau independen dan set kanonikal variates. Metode ini juga menyatakan korelasi variabel terhadap variate dimana variabel bergabung dalam setiap fungsi kanonikal. Hasil output SPSS muatan kanonikal akan disajikan pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4 Muatan Kanonikal

Correlations between DEPENDENT and canonical variables			
Function No.			
Variable	1	2	3
Pertmb_E .03356		.34765	.93702
Tingkt_K .69382	-.70308	.15587	-
Ksenj_Pe .51642	.80956	-.27916	-
Correlations between COVARIATES and canonical variables			
CAN. VAR.			
Covariate	1	2	3
DDF .62891		.74742	.21409
Elast_PA .99176	-.09273		-.08838
Kpst_Fis .05219	.90798		-.41575

Sumber : Hasil Olah Data SPSS oleh penulis

Berdasarkan tabel 4 untuk fungsi 1 dependen variabel memberikan dua angka canonical loading di atas 0,5 yang memberikan hubungan yang kuat dengan variabel independen yaitu -0,70308 (Tingkt_K) dan 0,80956 (Ksenj_Pe). Variabel Pertmb_E menunjukkan angka dibawah 0,5 yaitu 0,34765 yang artinya memiliki hubungan yang lemah dengan variabel independen. Sedangkan untuk variabel independen hanya terdapat dua angka korelasi di atas 0,5 yaitu 0,74742 (DDF) dan 0,9079 (Kpsts_Fi). Variabel Elast_PA menunjukkan angka korelasi di bawah 0,5 yaitu -0,09273 yang artinya memiliki hubungan yang

lemah terhadap variabel dependen (variabel yang memiliki weight relative besar (di atas 0,5) dianggap memberikan kontribusi lebih pada variant dan sebaliknya (Ghozali, 2011:370)).

KESIMPULAN

Hasil analisis dan intepretasi data sesuai dengan tujuan awal ini adalah mengetahui hubungan kemandirian fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan. Maka berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Ada hubungan yang signifikan antara variabel dependen kemandirian fiskal (melalui rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), elastisitas PAD, dan kapasitas fiskal) dengan variabel independen pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan secara bersama-sama. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan (sig. of f) pada *multivariate test of significance* yang nilainya berada di bawah 0,05 yaitu 0,000.

2. Dari ketiga variabel dependen kemandirian fiskal, hanya variabel DDF yang memiliki hubungan yang paling erat dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan.

Saran :

Saran yang diajukan terkait dengan beberapa kesimpulan yang adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa DDF memiliki hubungan paling kuat dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Oleh karena itu sebaiknya kabupaten/kota lebih meningkatkan kapasitas fiskal di daerahnya masing-masing, misalnya dengan menaikkan PAD .

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas variabel yang digunakan. Serta disarankan untuk memperbanyak jumlah periode tahun yang digunakan agar hasilnya lebih representative terhadap penelitian yang dilakukan.

Daftar Pustaka

- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis multivariate dengan Program SPSS, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2001. Anggaran Daerah dan “Fiscal Stress” (Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia). Dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBI) . Vol. 16, No. 4. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- _____. 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Risalam. 2013. “Analisis Tingkat Kemiskinan, Ketersediaan Infrastruktur Sekolah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Fiskal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2007-2011”. Dalam Jurnal Economics Development Analysis Journal 2. Halaman 197-208. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sasana, Hadi. 2009. “Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah Dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. Dalam Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Volume 16 No.1 Hal.50-72 Semarang. Universitas Diponegoro.
- Sianturi, Simonsen. 2011. “Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara)”. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi Undip.
- Sumarsono, Hadi. 2009. Analisis Kemandirian Otonomi Daerah: Kasus Kota Malang (1999-2004). Dalam JESP, Vol. 1, No.1. Hal 13-26. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Tarigan, Robinson. 2005 . Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi. Jakarta : Bumi Aksara.
- Waluyo, Joko. 2007. “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah Di Indonesia”. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- World Bank. 2000. Cities In Transition, Washinton DC, h. 1-2.
- Zulyanto, A. 2010. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. Tesis. Semarang: Fakultas Ekonomi Undip .